

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB berkaitan dengan peranannya dalam menjaga stabilitas keamanan Iraq setelah diinvasi oleh Amerika Serikat bersama sekutunya pada tanggal 20 Maret 2003 telah sesuai dengan fungsi dan wewenangnya seperti yang telah ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta Dewan Keamanan dapat menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dimana situasi keamanan di Iraq telah membawa perubahan pada situasi politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Beberapa negara dan kelompok yang ada di kawasan Timur Tengah ada yang tidak setuju terhadap keberadaan militer AS di Iraq dan beberapa bentuk ketidaksetujuan tersebut dengan melakukan aksi-aksi teroris di wilayah Iraq. Maka sebagai langkah untuk mengantisipasi tersebut, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi yang diantaranya Resolusi DK-PBB nomor 1472

(2003), 1483 (2003), 1500 (2003), 1511 (2003), 1546 (2004) dan Resolusi DK-PBB nomor 1723 (2006).

Bahwa Dewan Keamanan dalam kaitannya untuk dapat menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian serta pelanggaran terhadap perdamaian belum begitu maksimal. Tidak dapat diberikannya suatu keputusan yang berupa sanksi oleh Dewan Keamanan apabila negara yang melanggar perdamaian adalah anggota tetap Dewan Keamanan yang disebabkan memiliki hak veto dan menjadi salah satu penghambat dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional diantara penghambat lainnya seperti kebijakan AS setelah menginvasi Iraq serta perbedaan kepentingan politik masing-masing kelompok di Iraq.

B. Saran

1. Keseluruhan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya anggota Dewan Keamanan PBB berkewajiban untuk dapat menciptakan perdamaian dan keamanan internasional serta sebisa mungkin untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap kedaulatan dan integritas negara lain mengingat syarat keanggotaan di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa salah satunya didasarkan pada cinta akan perdamaian.
2. Untuk dapat mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional perlu adanya suatu tindakan membangun rasa saling percaya dan memupuk dengan baik resiprositas tujuan antarnegara dikalangan para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya kepada anggota Dewan Keamanan PBB dan lebih

mengutamakan pencapaian kepentingan perdamaian internasional daripada pencapaian kepentingan politik masing-masing negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bowett D.W., 1995, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Starke J.G., 1997, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugeng Istanto F., 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- , 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional Edisi II*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Syahmin AK., 1988, *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, C.V. Armico, Bandung.
- The National Security Strategy of The United States of America*, 2006, Embassy of the United States of America, Jakarta.
- United Nations Information Centre, *Pengetahuan Dasar Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Jakarta.
- Walter S. Jones, 1993, *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional & Tatanan Dunia 2*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan:

- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- U.N Security Council document S/RES/1284 (1999).
- U.N Security Council document S/RES/1441 (2002).

U.N Security Council document S/RES/1472 (2003).

U.N Security Council document S/RES/1483 (2003).

U.N Security Council document S/RES/1500 (2003).

U.N Security Council document S/RES/1511 (2003).

U.N Security Council document S/RES/1546 (2004).

U.N Security Council document S/RES/1723 (2006).

U.N Security Council document S/2003/232.

U.N Security Council document S/2003/580.

U.N Security Council document Press Release SC/7982.

Makalah:

Rizal Sukma, *Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS Dan Implikasi Regional*, 14 – 18 Juli 2003.

Surat Kabar dan Majalah:

Warta Berita, 9 Maret 2006.

Harian *KOMPAS*; Sabtu, 7 April 2007.

Harian PIKIRAN RAKYAT, *Invasi AS ke Iraq Ilegal*, Jumat; 17 September 2004.

Harian PIKIRAN RAKYAT, *Mewujudkan Perdamaian di Irak* oleh Dedy Djama'uddin Malik; Selasa, 26 Desember 2006.

Majalah TEMPO, *Maling Teriak Maling*, Edisi 13 – 19 Januari 2003.

Website:

www.kompas.com

www.unmovic.org, *UNMOVIC Draft Work Programme*

http://id.wikipedia.org/wiki/Invasi_Iraq_2003

<http://www.indonesiamission-ny.org/press/pr032603.htm>

http://www.state.gov/www/regions/nea/iraq_white_paper.html







UNITED NATIONS

UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE ◆ JAKARTA

SURAT KETERANGAN

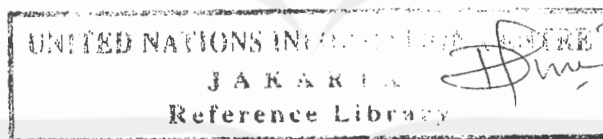
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : ROY OLLIVER OLLY SIREGAR
NIM : 03 05 08538
Jurusan : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Universitas : ATMA JAYA YOGYA KARTA

telah melakukan penelitian kepustakaan di Perpustakaan United Nations Information Centre Jakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta,



Dahlia Sihombing
Reference Assistant



**DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KETERANGAN

No : 204/PL/IV/2006/47

Merujuk Surat Pengantar No. 01113/V tanggal 12 Maret 2007, dari Fakultas Hukum Kenegaraan, Pemerintahan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Direktorat Keamanan Internaional dan Perlucutan Senjata menerangkan bahwa :

Nama : Roy Olliver Olly S.
NIM : 8538/H
Jurusan : Hukum Kenegaraan
Fakultas : Hukum Kenegaraan
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

telah mengadakan riset pada tanggal 5 April 2007 di Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Departemen Luar Negeri. Riset tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsinya tentang :

“PERANAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN IRAK SETELAH INVASI MILITER AS KE IRAK PADA TANGGAL 20 MARET 2003”

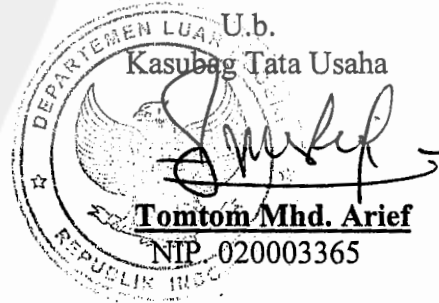
Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 April 2007

A.n. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

U.b.

Kasubag Tata Usaha



Tomtom Mhd. Arief

NIP. 020003365



Embassy of the United States of America

SURAT KETERANGAN

Jakarta, 10 April 2007.

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : Roy Olliver Olly S.
No. Pokok Mahasiswa : 8538/H
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fak./Jurusan : Hukum Kcnegaraan/ Pemerintah

Telah melaksanakan studi literatur di Information Resource Center, Kedutaan Besar Amerika di Jakarta untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tertanda,

Public Affairs Section - U.S. Embassy Jakarta
Information Resource Center
Aden Farida
Merdeka Selatan 4-5, Jakarta 10110
Reference Librarian

Information Resource Center
Public Affairs Section
U.S. Embassy Jakarta
Tel: 021-3435-9569
Fax: 021-350-8566
Email: Faridaax@state.gov



Security Council

Distr.
GENERAL

S/RES/1284 (1999)
17 December 1999

RESOLUTION 1284 (1999)

Adopted by the Security Council at its 4084th meeting,
on 17 December 1999

The Security Council,

Recalling its previous relevant resolutions, including its resolutions 661 (1990) of 6 August 1990, 687 (1991) of 3 April 1991, 699 (1991) of 17 June 1991, 707 (1991) of 15 August 1991, 715 (1991) of 11 October 1991, 986 (1995) of 14 April 1995, 1051 (1996) of 27 March 1996, 1153 (1998) of 20 February 1998, 1175 (1998) of 19 June 1998, 1242 (1999) of 21 May 1999 and 1266 (1999) of 4 October 1999,

Recalling the approval by the Council in its resolution 715 (1991) of the plans for future ongoing monitoring and verification submitted by the Secretary-General and the Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) in pursuance of paragraphs 10 and 13 of resolution 687 (1991),

Welcoming the reports of the three panels on Iraq (S/1999/356), and having held a comprehensive consideration of them and the recommendations contained in them,

Stressing the importance of a comprehensive approach to the full implementation of all relevant Security Council resolutions regarding Iraq and the need for Iraqi compliance with these resolutions,

Recalling the goal of establishing in the Middle East a zone free from weapons of mass destruction and all missiles for their delivery and the objective of a global ban on chemical weapons as referred to in paragraph 14 of resolution 687 (1991),

Concerned at the humanitarian situation in Iraq, and determined to improve that situation,

Recalling with concern that the repatriation and return of all Kuwaiti and third country nationals or their remains, present in Iraq on or after 2 August 1990, pursuant to paragraph 2 (c) of resolution 686 (1991) of

2 March 1991 and paragraph 30 of resolution 687 (1991), have not yet been fully carried out by Iraq,

Recalling that in its resolutions 686 (1991) and 687 (1991) the Council demanded that Iraq return in the shortest possible time all Kuwaiti property it had seized, and noting with regret that Iraq has still not complied fully with this demand,

Acknowledging the progress made by Iraq towards compliance with the provisions of resolution 687 (1991), but noting that, as a result of its failure to implement the relevant Council resolutions fully, the conditions do not exist which would enable the Council to take a decision pursuant to resolution 687 (1991) to lift the prohibitions referred to in that resolution,

Reiterating the commitment of all Member States to the sovereignty, territorial integrity and political independence of Kuwait, Iraq and the neighbouring States,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking into account that operative provisions of this resolution relate to previous resolutions adopted under Chapter VII of the Charter,

A.

1. Decides to establish, as a subsidiary body of the Council, the United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC) which replaces the Special Commission established pursuant to paragraph 9 (b) of resolution 687 (1991);

2. Decides also that UNMOVIC will undertake the responsibilities mandated to the Special Commission by the Council with regard to the verification of compliance by Iraq with its obligations under paragraphs 8, 9 and 10 of resolution 687 (1991) and other related resolutions, that UNMOVIC will establish and operate, as was recommended by the panel on disarmament and current and future ongoing monitoring and verification issues, a reinforced system of ongoing monitoring and verification, which will implement the plan approved by the Council in resolution 715 (1991) and address unresolved disarmament issues, and that UNMOVIC will identify, as necessary in accordance with its mandate, additional sites in Iraq to be covered by the reinforced system of ongoing monitoring and verification;

3. Reaffirms the provisions of the relevant resolutions with regard to the role of the IAEA in addressing compliance by Iraq with paragraphs 12 and 13 of resolution 687 (1991) and other related resolutions, and requests the Director General of the IAEA to maintain this role with the assistance and cooperation of UNMOVIC;

4. Reaffirms its resolutions 687 (1991), 699 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996), 1154 (1998) and all other relevant resolutions and statements of its President, which establish the criteria for Iraqi compliance, affirms that the obligations of Iraq referred to in those resolutions and statements with regard to cooperation with the Special Commission, unrestricted access and provision of information will apply in respect of UNMOVIC, and

/...

decides in particular that Iraq shall allow UNMOVIC teams immediate, unconditional and unrestricted access to any and all areas, facilities, equipment, records and means of transport which they wish to inspect in accordance with the mandate of UNMOVIC, as well as to all officials and other persons under the authority of the Iraqi Government whom UNMOVIC wishes to interview so that UNMOVIC may fully discharge its mandate;

5. Requests the Secretary-General, within 30 days of the adoption of this resolution, to appoint, after consultation with and subject to the approval of the Council, an Executive Chairman of UNMOVIC who will take up his mandated tasks as soon as possible, and, in consultation with the Executive Chairman and the Council members, to appoint suitably qualified experts as a College of Commissioners for UNMOVIC which will meet regularly to review the implementation of this and other relevant resolutions and provide professional advice and guidance to the Executive Chairman, including on significant policy decisions and on written reports to be submitted to the Council through the Secretary-General;

6. Requests the Executive Chairman of UNMOVIC, within 45 days of his appointment, to submit to the Council, in consultation with and through the Secretary-General, for its approval an organizational plan for UNMOVIC, including its structure, staffing requirements, management guidelines, recruitment and training procedures, incorporating as appropriate the recommendations of the panel on disarmament and current and future ongoing monitoring and verification issues, and recognizing in particular the need for an effective, cooperative management structure for the new organization, for staffing with suitably qualified and experienced personnel, who would be regarded as international civil servants subject to Article 100 of the Charter of the United Nations, drawn from the broadest possible geographical base, including as he deems necessary from international arms control organizations, and for the provision of high quality technical and cultural training;

7. Decides that UNMOVIC and the IAEA, not later than 60 days after they have both started work in Iraq, will each draw up, for approval by the Council, a work programme for the discharge of their mandates, which will include both the implementation of the reinforced system of ongoing monitoring and verification, and the key remaining disarmament tasks to be completed by Iraq pursuant to its obligations to comply with the disarmament requirements of resolution 687 (1991) and other related resolutions, which constitute the governing standard of Iraqi compliance, and further decides that what is required of Iraq for the implementation of each task shall be clearly defined and precise;

8. Requests the Executive Chairman of UNMOVIC and the Director General of the IAEA, drawing on the expertise of other international organizations as appropriate, to establish a unit which will have the responsibilities of the joint unit constituted by the Special Commission and the Director General of the IAEA under paragraph 16 of the export/import mechanism approved by resolution 1051 (1996), and also requests the Executive Chairman of UNMOVIC, in consultation with the Director General of the IAEA, to resume the revision and updating of the lists of items and technology to which the mechanism applies;

/...

9. Decides that the Government of Iraq shall be liable for the full costs of UNMOVIC and the IAEA in relation to their work under this and other related resolutions on Iraq;

10. Requests Member States to give full cooperation to UNMOVIC and the IAEA in the discharge of their mandates;

11. Decides that UNMOVIC shall take over all assets, liabilities and archives of the Special Commission, and that it shall assume the Special Commission's part in agreements existing between the Special Commission and Iraq and between the United Nations and Iraq, and affirms that the Executive Chairman, the Commissioners and the personnel serving with UNMOVIC shall have the rights, privileges, facilities and immunities of the Special Commission;

12. Requests the Executive Chairman of UNMOVIC to report, through the Secretary-General, to the Council, following consultation with the Commissioners, every three months on the work of UNMOVIC, pending submission of the first reports referred to in paragraph 33 below, and to report immediately when the reinforced system of ongoing monitoring and verification is fully operational in Iraq;

B.

13. Reiterates the obligation of Iraq, in furtherance of its commitment to facilitate the repatriation of all Kuwaiti and third country nationals referred to in paragraph 30 of resolution 687 (1991), to extend all necessary cooperation to the International Committee of the Red Cross, and calls upon the Government of Iraq to resume cooperation with the Tripartite Commission and Technical Subcommittee established to facilitate work on this issue;

14. Requests the Secretary-General to report to the Council every four months on compliance by Iraq with its obligations regarding the repatriation or return of all Kuwaiti and third country nationals or their remains, to report every six months on the return of all Kuwaiti property, including archives, seized by Iraq, and to appoint a high-level coordinator for these issues;

C.

15. Authorizes States, notwithstanding the provisions of paragraphs 3 (a), 3 (b) and 4 of resolution 661 (1990) and subsequent relevant resolutions, to permit the import of any volume of petroleum and petroleum products originating in Iraq, including financial and other essential transactions directly relating thereto, as required for the purposes and on the conditions set out in paragraph 1 (a) and (b) and subsequent provisions of resolution 986 (1995) and related resolutions;

16. Underlines, in this context, its intention to take further action, including permitting the use of additional export routes for petroleum and petroleum products, under appropriate conditions otherwise consistent with the purpose and provisions of resolution 986 (1995) and related resolutions;

17. Directs the Committee established by resolution 661 (1990) to approve, on the basis of proposals from the Secretary-General, lists of humanitarian

/...

items, including foodstuffs, pharmaceutical and medical supplies, as well as basic or standard medical and agricultural equipment and basic or standard educational items, decides, notwithstanding paragraph 3 of resolution 661 (1990) and paragraph 20 of resolution 687 (1991), that supplies of these items will not be submitted for approval of that Committee, except for items subject to the provisions of resolution 1051 (1996), and will be notified to the Secretary-General and financed in accordance with the provisions of paragraph 8 (a) and 8 (b) of resolution 986 (1995), and requests the Secretary-General to inform the Committee in a timely manner of all such notifications received and actions taken;

18. Requests the Committee established by resolution 661 (1990) to appoint, in accordance with resolutions 1175 (1998) and 1210 (1998), a group of experts, including independent inspection agents appointed by the Secretary-General in accordance with paragraph 6 of resolution 986 (1995), decides that this group will be mandated to approve speedily contracts for the parts and the equipments necessary to enable Iraq to increase its exports of petroleum and petroleum products, according to lists of parts and equipments approved by that Committee for each individual project, and requests the Secretary-General to continue to provide for the monitoring of these parts and equipments inside Iraq;

19. Encourages Member States and international organizations to provide supplementary humanitarian assistance to Iraq and published material of an educational character to Iraq;

20. Decides to suspend, for an initial period of six months from the date of the adoption of this resolution and subject to review, the implementation of paragraph 8 (g) of resolution 986 (1995);

21. Requests the Secretary-General to take steps to maximize, drawing as necessary on the advice of specialists, including representatives of international humanitarian organizations, the effectiveness of the arrangements set out in resolution 986 (1995) and related resolutions including the humanitarian benefit to the Iraqi population in all areas of the country, and further requests the Secretary-General to continue to enhance as necessary the United Nations observation process in Iraq, ensuring that all supplies under the humanitarian programme are utilized as authorized, to bring to the attention of the Council any circumstances preventing or impeding effective and equitable distribution and to keep the Council informed of the steps taken towards the implementation of this paragraph;

22. Requests also the Secretary-General to minimize the cost of the United Nations activities associated with the implementation of resolution 986 (1995) as well as the cost of the independent inspection agents and the certified public accountants appointed by him, in accordance with paragraphs 6 and 7 of resolution 986 (1995);

23. Requests further the Secretary-General to provide Iraq and the Committee established by resolution 661 (1990) with a daily statement of the status of the escrow account established by paragraph 7 of resolution 986 (1995);

/...

24. Requests the Secretary-General to make the necessary arrangements, subject to Security Council approval, to allow funds deposited in the escrow account established by resolution 986 (1995) to be used for the purchase of locally produced goods and to meet the local cost for essential civilian needs which have been funded in accordance with the provisions of resolution 986 (1995) and related resolutions, including, where appropriate, the cost of installation and training services;

25. Directs the Committee established by resolution 661 (1990) to take a decision on all applications in respect of humanitarian and essential civilian needs within a target of two working days of receipt of these applications from the Secretary-General, and to ensure that all approval and notification letters issued by the Committee stipulate delivery within a specified time, according to the nature of the items to be supplied, and requests the Secretary-General to notify the Committee of all applications for humanitarian items which are included in the list to which the export/import mechanism approved by resolution 1051 (1996) applies;

26. Decides that Hajj pilgrimage flights which do not transport cargo into or out of Iraq are exempt from the provisions of paragraph 3 of resolution 661 (1990) and resolution 670 (1990), provided timely notification of each flight is made to the Committee established by resolution 661 (1990), and requests the Secretary-General to make the necessary arrangements, for approval by the Security Council, to provide for reasonable expenses related to the Hajj pilgrimage to be met by funds in the escrow account established by resolution 986 (1995);

27. Calls upon the Government of Iraq:

- (i) to take all steps to ensure the timely and equitable distribution of all humanitarian goods, in particular medical supplies, and to remove and avoid delays at its warehouses;
- (ii) to address effectively the needs of vulnerable groups, including children, pregnant women, the disabled, the elderly and the mentally ill among others, and to allow freer access, without any discrimination, including on the basis of religion or nationality, by United Nations agencies and humanitarian organizations to all areas and sections of the population for evaluation of their nutritional and humanitarian condition;
- (iii) to prioritize applications for humanitarian goods under the arrangements set out in resolution 986 (1995) and related resolutions;
- (iv) to ensure that those involuntarily displaced receive humanitarian assistance without the need to demonstrate that they have resided for six months in their places of temporary residence;
- (v) to extend full cooperation to the United Nations Office for Project Services mine-clearance programme in the three northern Governorates of Iraq and to consider the initiation of the demining efforts in other Governorates;

/...

28. Requests the Secretary-General to report on the progress made in meeting the humanitarian needs of the Iraqi people and on the revenues necessary to meet those needs, including recommendations on necessary additions to the current allocation for oil spare parts and equipment, on the basis of a comprehensive survey of the condition of the Iraqi oil production sector, not later than 60 days from the date of the adoption of this resolution and updated thereafter as necessary;

29. Expresses its readiness to authorize additions to the current allocation for oil spare parts and equipment, on the basis of the report and recommendations requested in paragraph 28 above, in order to meet the humanitarian purposes set out in resolution 986 (1995) and related resolutions;

30. Requests the Secretary-General to establish a group of experts, including oil industry experts, to report within 100 days of the date of adoption of this resolution on Iraq's existing petroleum production and export capacity and to make recommendations, to be updated as necessary, on alternatives for increasing Iraq's petroleum production and export capacity in a manner consistent with the purposes of relevant resolutions, and on the options for involving foreign oil companies in Iraq's oil sector, including investments, subject to appropriate monitoring and controls;

31. Notes that in the event of the Council acting as provided for in paragraph 33 of this resolution to suspend the prohibitions referred to in that paragraph, appropriate arrangements and procedures will need, subject to paragraph 35 below, to be agreed by the Council in good time beforehand, including suspension of provisions of resolution 986 (1995) and related resolutions;

32. Requests the Secretary-General to report to the Council on the implementation of paragraphs 15 to 30 of this resolution within 30 days of the adoption of this resolution;

D.

33. Expresses its intention, upon receipt of reports from the Executive Chairman of UNMOVIC and from the Director General of the IAEA that Iraq has cooperated in all respects with UNMOVIC and the IAEA in particular in fulfilling the work programmes in all the aspects referred to in paragraph 7 above, for a period of 120 days after the date on which the Council is in receipt of reports from both UNMOVIC and the IAEA that the reinforced system of ongoing monitoring and verification is fully operational, to suspend with the fundamental objective of improving the humanitarian situation in Iraq and securing the implementation of the Council's resolutions, for a period of 120 days renewable by the Council, and subject to the elaboration of effective financial and other operational measures to ensure that Iraq does not acquire prohibited items, prohibitions against the import of commodities and products originating in Iraq, and prohibitions against the sale, supply and delivery to Iraq of civilian commodities and products other than those referred to in paragraph 24 of resolution 687 (1991) or those to which the mechanism established by resolution 1051 (1996) applies;

/...

34. Decides that in reporting to the Council for the purposes of paragraph 33 above, the Executive Chairman of UNMOVIC will include as a basis for his assessment the progress made in completing the tasks referred to in paragraph 7 above;

35. Decides that if at any time the Executive Chairman of UNMOVIC or the Director General of the IAEA reports that Iraq is not cooperating in all respects with UNMOVIC or the IAEA or if Iraq is in the process of acquiring any prohibited items, the suspension of the prohibitions referred to in paragraph 33 above shall terminate on the fifth working day following the report, unless the Council decides to the contrary;

36. Expresses its intention to approve arrangements for effective financial and other operational measures, including on the delivery of and payment for authorized civilian commodities and products to be sold or supplied to Iraq, in order to ensure that Iraq does not acquire prohibited items in the event of suspension of the prohibitions referred to in paragraph 33 above, to begin the elaboration of such measures not later than the date of the receipt of the initial reports referred to in paragraph 33 above, and to approve such arrangements before the Council decision in accordance with that paragraph;

37. Further expresses its intention to take steps, based on the report and recommendations requested in paragraph 30 above, and consistent with the purpose of resolution 986 (1995) and related resolutions, to enable Iraq to increase its petroleum production and export capacity, upon receipt of the reports relating to the cooperation in all respects with UNMOVIC and the IAEA referred to in paragraph 33 above;

38. Reaffirms its intention to act in accordance with the relevant provisions of resolution 687 (1991) on the termination of prohibitions referred to in that resolution;

39. Decides to remain actively seized of the matter and expresses its intention to consider action in accordance with paragraph 33 above no later than 12 months from the date of the adoption of this resolution provided the conditions set out in paragraph 33 above have been satisfied by Iraq.

**Security Council**Distr.: General
8 November 2002**Resolution 1441 (2002)****Adopted by the Security Council at its 4644th meeting, on
8 November 2002***The Security Council,*

Recalling all its previous relevant resolutions, in particular its resolutions 661 (1990) of 6 August 1990, 678 (1990) of 29 November 1990, 686 (1991) of 2 March 1991, 687 (1991) of 3 April 1991, 688 (1991) of 5 April 1991, 707 (1991) of 15 August 1991, 715 (1991) of 11 October 1991, 986 (1995) of 14 April 1995, and 1284 (1999) of 17 December 1999, and all the relevant statements of its President,

Recalling also its resolution 1382 (2001) of 29 November 2001 and its intention to implement it fully,

Recognizing the threat Iraq's non-compliance with Council resolutions and proliferation of weapons of mass destruction and long-range missiles poses to international peace and security,

Recalling that its resolution 678 (1990) authorized Member States to use all necessary means to uphold and implement its resolution 660 (1990) of 2 August 1990 and all relevant resolutions subsequent to resolution 660 (1990) and to restore international peace and security in the area,

Further recalling that its resolution 687 (1991) imposed obligations on Iraq as a necessary step for achievement of its stated objective of restoring international peace and security in the area,

Deploring the fact that Iraq has not provided an accurate, full, final, and complete disclosure, as required by resolution 687 (1991), of all aspects of its programmes to develop weapons of mass destruction and ballistic missiles with a range greater than one hundred and fifty kilometres, and of all holdings of such weapons, their components and production facilities and locations, as well as all other nuclear programmes, including any which it claims are for purposes not related to nuclear-weapons-usable material,

Deploring further that Iraq repeatedly obstructed immediate, unconditional, and unrestricted access to sites designated by the United Nations Special Commission (UNSCOM) and the International Atomic Energy Agency (IAEA), failed to cooperate fully and unconditionally with UNSCOM and IAEA weapons

02-68226 (E)

0268226

inspectors, as required by resolution 687 (1991), and ultimately ceased all cooperation with UNSCOM and the IAEA in 1998.

Deploring the absence, since December 1998, in Iraq of international monitoring, inspection, and verification, as required by relevant resolutions, of weapons of mass destruction and ballistic missiles, in spite of the Council's repeated demands that Iraq provide immediate, unconditional, and unrestricted access to the United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC), established in resolution 1284 (1999) as the successor organization to UNSCOM, and the IAEA, and regretting the consequent prolonging of the crisis in the region and the suffering of the Iraqi people,

Deploring also that the Government of Iraq has failed to comply with its commitments pursuant to resolution 687 (1991) with regard to terrorism, pursuant to resolution 688 (1991) to end repression of its civilian population and to provide access by international humanitarian organizations to all those in need of assistance in Iraq, and pursuant to resolutions 686 (1991), 687 (1991), and 1284 (1999) to return or cooperate in accounting for Kuwaiti and third country nationals wrongfully detained by Iraq, or to return Kuwaiti property wrongfully seized by Iraq,

Recalling that in its resolution 687 (1991) the Council declared that a ceasefire would be based on acceptance by Iraq of the provisions of that resolution, including the obligations on Iraq contained therein,

Determined to ensure full and immediate compliance by Iraq without conditions or restrictions with its obligations under resolution 687 (1991) and other relevant resolutions and recalling that the resolutions of the Council constitute the governing standard of Iraqi compliance,

Recalling that the effective operation of UNMOVIC, as the successor organization to the Special Commission, and the IAEA is essential for the implementation of resolution 687 (1991) and other relevant resolutions,

Noting that the letter dated 16 September 2002 from the Minister for Foreign Affairs of Iraq addressed to the Secretary-General is a necessary first step toward rectifying Iraq's continued failure to comply with relevant Council resolutions,

Noting further the letter dated 8 October 2002 from the Executive Chairman of UNMOVIC and the Director-General of the IAEA to General Al-Saadi of the Government of Iraq laying out the practical arrangements, as a follow-up to their meeting in Vienna, that are prerequisites for the resumption of inspections in Iraq by UNMOVIC and the IAEA, and expressing the gravest concern at the continued failure by the Government of Iraq to provide confirmation of the arrangements as laid out in that letter,

Reaffirming the commitment of all Member States to the sovereignty and territorial integrity of Iraq, Kuwait, and the neighbouring States,

Commending the Secretary-General and members of the League of Arab States and its Secretary-General for their efforts in this regard,

Determined to secure full compliance with its decisions,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Decides* that Iraq has been and remains in material breach of its obligations under relevant resolutions, including resolution 687 (1991), in particular through Iraq's failure to cooperate with United Nations inspectors and the IAEA, and to complete the actions required under paragraphs 8 to 13 of resolution 687 (1991);

2. *Decides*, while acknowledging paragraph 1 above, to afford Iraq, by this resolution, a final opportunity to comply with its disarmament obligations under relevant resolutions of the Council; and accordingly decides to set up an enhanced inspection regime with the aim of bringing to full and verified completion the disarmament process established by resolution 687 (1991) and subsequent resolutions of the Council;

3. *Decides* that, in order to begin to comply with its disarmament obligations, in addition to submitting the required biannual declarations, the Government of Iraq shall provide to UNMOVIC, the IAEA, and the Council, not later than 30 days from the date of this resolution, a currently accurate, full, and complete declaration of all aspects of its programmes to develop chemical, biological, and nuclear weapons, ballistic missiles, and other delivery systems such as unmanned aerial vehicles and dispersal systems designed for use on aircraft, including any holdings and precise locations of such weapons, components, sub-components, stocks of agents, and related material and equipment, the locations and work of its research, development and production facilities, as well as all other chemical, biological, and nuclear programmes, including any which it claims are for purposes not related to weapon production or material;

4. *Decides* that false statements or omissions in the declarations submitted by Iraq pursuant to this resolution and failure by Iraq at any time to comply with, and cooperate fully in the implementation of, this resolution shall constitute a further material breach of Iraq's obligations and will be reported to the Council for assessment in accordance with paragraphs 11 and 12 below;

5. *Decides* that Iraq shall provide UNMOVIC and the IAEA immediate, unimpeded, unconditional, and unrestricted access to any and all, including underground, areas, facilities, buildings, equipment, records, and means of transport which they wish to inspect, as well as immediate, unimpeded, unrestricted, and private access to all officials and other persons whom UNMOVIC or the IAEA wish to interview in the mode or location of UNMOVIC's or the IAEA's choice pursuant to any aspect of their mandates; further decides that UNMOVIC and the IAEA may at their discretion conduct interviews inside or outside of Iraq, may facilitate the travel of those interviewed and family members outside of Iraq, and that, at the sole discretion of UNMOVIC and the IAEA, such interviews may occur without the presence of observers from the Iraqi Government; and instructs UNMOVIC and requests the IAEA to resume inspections no later than 45 days following adoption of this resolution and to update the Council 60 days thereafter;

6. *Endorses* the 8 October 2002 letter from the Executive Chairman of UNMOVIC and the Director-General of the IAEA to General Al-Saadi of the Government of Iraq, which is annexed hereto, and decides that the contents of the letter shall be binding upon Iraq;

7. *Decides* further that, in view of the prolonged interruption by Iraq of the presence of UNMOVIC and the IAEA and in order for them to accomplish the tasks

set forth in this resolution and all previous relevant resolutions and notwithstanding prior understandings, the Council hereby establishes the following revised or additional authorities, which shall be binding upon Iraq, to facilitate their work in Iraq:

- UNMOVIC and the IAEA shall determine the composition of their inspection teams and ensure that these teams are composed of the most qualified and experienced experts available;
- All UNMOVIC and IAEA personnel shall enjoy the privileges and immunities, corresponding to those of experts on mission, provided in the Convention on Privileges and Immunities of the United Nations and the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA;
- UNMOVIC and the IAEA shall have unrestricted rights of entry into and out of Iraq, the right to free, unrestricted, and immediate movement to and from inspection sites, and the right to inspect any sites and buildings, including immediate, unimpeded, unconditional, and unrestricted access to Presidential Sites equal to that at other sites, notwithstanding the provisions of resolution 1154 (1998) of 2 March 1998;
- UNMOVIC and the IAEA shall have the right to be provided by Iraq the names of all personnel currently and formerly associated with Iraq's chemical, biological, nuclear, and ballistic missile programmes and the associated research, development, and production facilities;
- Security of UNMOVIC and IAEA facilities shall be ensured by sufficient United Nations security guards;
- UNMOVIC and the IAEA shall have the right to declare, for the purposes of freezing a site to be inspected, exclusion zones, including surrounding areas and transit corridors, in which Iraq will suspend ground and aerial movement so that nothing is changed in or taken out of a site being inspected;
- UNMOVIC and the IAEA shall have the free and unrestricted use and landing of fixed- and rotary-winged aircraft, including manned and unmanned reconnaissance vehicles;
- UNMOVIC and the IAEA shall have the right at their sole discretion verifiably to remove, destroy, or render harmless all prohibited weapons, subsystems, components, records, materials, and other related items, and the right to impound or close any facilities or equipment for the production thereof; and
- UNMOVIC and the IAEA shall have the right to free import and use of equipment or materials for inspections and to seize and export any equipment, materials, or documents taken during inspections, without search of UNMOVIC or IAEA personnel or official or personal baggage;

8. *Decides* further that Iraq shall not take or threaten hostile acts directed against any representative or personnel of the United Nations or the IAEA or of any Member State taking action to uphold any Council resolution;

9. *Requests* the Secretary-General immediately to notify Iraq of this resolution, which is binding on Iraq; demands that Iraq confirm within seven days of that notification its intention to comply fully with this resolution; and demands

further that Iraq cooperate immediately, unconditionally, and actively with UNMOVIC and the IAEA;

10. *Requests* all Member States to give full support to UNMOVIC and the IAEA in the discharge of their mandates, including by providing any information related to prohibited programmes or other aspects of their mandates, including on Iraqi attempts since 1998 to acquire prohibited items, and by recommending sites to be inspected, persons to be interviewed, conditions of such interviews, and data to be collected, the results of which shall be reported to the Council by UNMOVIC and the IAEA;

11. *Directs* the Executive Chairman of UNMOVIC and the Director-General of the IAEA to report immediately to the Council any interference by Iraq with inspection activities, as well as any failure by Iraq to comply with its disarmament obligations, including its obligations regarding inspections under this resolution;

12. *Decides* to convene immediately upon receipt of a report in accordance with paragraphs 4 or 11 above, in order to consider the situation and the need for full compliance with all of the relevant Council resolutions in order to secure international peace and security;

13. *Recalls*, in that context, that the Council has repeatedly warned Iraq that it will face serious consequences as a result of its continued violations of its obligations;

14. *Decides* to remain seized of the matter.

Annex

Text of Blix/El-Baradei letter

**United Nations Monitoring, Verification
and Inspection Commission**

International Atomic Energy Agency

The Executive Chairman

The Director General

8 October 2002

Dear General Al-Saadi,

During our recent meeting in Vienna, we discussed practical arrangements that are prerequisites for the resumption of inspections in Iraq by UNMOVIC and the IAEA. As you recall, at the end of our meeting in Vienna we agreed on a statement which listed some of the principal results achieved, particularly Iraq's acceptance of all the rights of inspection provided for in all of the relevant Security Council resolutions. This acceptance was stated to be without any conditions attached.

During our 3 October 2002 briefing to the Security Council, members of the Council suggested that we prepare a written document on all of the conclusions we reached in Vienna. This letter lists those conclusions and seeks your confirmation thereof. We shall report accordingly to the Security Council.

In the statement at the end of the meeting, it was clarified that UNMOVIC and the IAEA will be granted immediate, unconditional and unrestricted access to sites, including what was termed "sensitive sites" in the past. As we noted, however, eight presidential sites have been the subject of special procedures under a Memorandum of Understanding of 1998. Should these sites be subject, as all other sites, to immediate, unconditional and unrestricted access, UNMOVIC and the IAEA would conduct inspections there with the same professionalism.

H.E. General Amir H. Al-Saadi
Advisor
Presidential Office
Baghdad
Iraq

We confirm our understanding that UNMOVIC and the IAEA have the right to determine the number of inspectors required for access to any particular site. This determination will be made on the basis of the size and complexity of the site being inspected. We also confirm that Iraq will be informed of the designation of additional sites, i.e. sites not declared by Iraq or previously inspected by either UNSCOM or the IAEA, through a Notification of Inspection (NIS) provided upon arrival of the inspectors at such sites.

Iraq will ensure that no proscribed material, equipment, records or other relevant items will be destroyed except in the presence of UNMOVIC and/or IAEA inspectors, as appropriate, and at their request.

UNMOVIC and the IAEA may conduct interviews with any person in Iraq whom they believe may have information relevant to their mandate. Iraq will facilitate such interviews. It is for UNMOVIC and the IAEA to choose the mode and location for interviews.

The National Monitoring Directorate (NMD) will, as in the past, serve as the Iraqi counterpart for the inspectors. The Baghdad Ongoing Monitoring and Verification Centre (BOMVIC) will be maintained on the same premises and under the same conditions as was the former Baghdad Monitoring and Verification Centre. The NMD will make available services as before, cost free, for the refurbishment of the premises.

The NMD will provide free of cost: (a) escorts to facilitate access to sites to be inspected and communication with personnel to be interviewed; (b) a hotline for BOMVIC which will be staffed by an English speaking person on a 24 hour a day/seven days a week basis; (c) support in terms of personnel and ground transportation within the country, as requested; and (d) assistance in the movement of materials and equipment at inspectors' request (construction, excavation equipment, etc.). NMD will also ensure that escorts are available in the event of inspections outside normal working hours, including at night and on holidays.

Regional UNMOVIC/IAEA offices may be established, for example, in Basra and Mosul, for the use of their inspectors. For this purpose, Iraq will provide, without cost, adequate office buildings, staff accommodation, and appropriate escort personnel.

UNMOVIC and the IAEA may use any type of voice or data transmission, including satellite and/or inland networks, with or without encryption capability. UNMOVIC and the IAEA may also install equipment in the field with the capability for transmission of data directly to the BOMVIC, New York and Vienna (e.g. sensors, surveillance cameras). This will be facilitated by Iraq and there will be no interference by Iraq with UNMOVIC or IAEA communications.

Iraq will provide, without cost, physical protection of all surveillance equipment, and construct antennae for remote transmission of data, at the request of UNMOVIC and the IAEA. Upon request by UNMOVIC through the NMD, Iraq will allocate frequencies for communications equipment.

Iraq will provide security for all UNMOVIC and IAEA personnel. Secure and suitable accommodations will be designated at normal rates by Iraq for these personnel. For their part, UNMOVIC and the IAEA will require that their staff not stay at any accommodation other than those identified in consultation with Iraq.

On the use of fixed-wing aircraft for transport of personnel and equipment and for inspection purposes, it was clarified that aircraft used by UNMOVIC and IAEA staff arriving in Baghdad may land at Saddam International Airport. The points of departure of incoming aircraft will be decided by UNMOVIC. The Rasheed airbase will continue to be used for UNMOVIC and IAEA helicopter operations. UNMOVIC and Iraq will establish air liaison offices at the airbase. At both Saddam International Airport and Rasheed airbase, Iraq will provide the necessary support premises and facilities. Aircraft fuel will be provided by Iraq, as before, free of charge.

On the wider issue of air operations in Iraq, both fixed-wing and rotary, Iraq will guarantee the safety of air operations in its air space outside the no-fly zones. With regard to air operations in the no-fly zones, Iraq will take all steps within its control to ensure the safety of such operations.

Helicopter flights may be used, as needed, during inspections and for technical activities, such as gamma detection, without limitation in all parts of Iraq and without any area excluded. Helicopters may also be used for medical evacuation.

On the question of aerial imagery, UNMOVIC may wish to resume the use of U-2 or Mirage overflights. The relevant practical arrangements would be similar to those implemented in the past.

As before, visas for all arriving staff will be issued at the point of entry on the basis of the UN Laissez- Passer or UN Certificate; no other entry or exit formalities will be required. The aircraft passenger manifest will be provided one hour in advance of the arrival of the aircraft in Baghdad. There will be no searching of UNMOVIC or IAEA personnel or of official or personal baggage. UNMOVIC and the IAEA will ensure that their personnel respect the laws of Iraq restricting the export of certain items, for example, those related to Iraq's national cultural heritage. UNMOVIC and the IAEA may bring into, and remove from, Iraq all of the items and materials they require, including satellite phones and other equipment. With respect to samples, UNMOVIC and IAEA will, where feasible, split samples so that Iraq may receive a portion while another portion is kept for reference purposes. Where appropriate, the organizations will send the samples to more than one laboratory for analysis.

We would appreciate your confirmation of the above as a correct reflection of our talks in Vienna.

Naturally, we may need other practical arrangements when proceeding with inspections. We would expect in such matters, as with the above, Iraq's co-operation in all respect.

Yours sincerely,

(Signed)
Hans **Blix**
Executive Chairman
United Nations Monitoring,
Verification and Inspection Commission

(Signed)
Mohamed **ElBaradei**
Director General
International Atomic Energy Agency

